

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI STRATEGI PENGUATAN  
KELEMBAGAAN EKONOMI DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

**Asrip Putera  
Rahmat Madjid  
Hastuti Mustamin**

Faculty of Economics and Business, Halu Oleo University, Kendari, Indonesia  
(Email; asripputera@gmail.com)

*The purpose this study was to identify; economic institutions of society, Institutional constraints and community economic development in North Konawe. The study was conducted on the economic institutions of society in North Konawe by taking samples at five districts. Data were collected by in-depth interviews and documentation. Data analysis was performed through the reduction, presentation and verification. The study concluded: 1.The Economic Institute of the communities in district North Konawe are cooperatives and farmer groups, 2.An obstacle to development of economic institutions of society, namely: a).Cooperatives: members do not understand the purpose of establishing a cooperative, members simply as a requirement for the establishment, the management does not understand the principle of cooperation and good business management, lack of supervision, the local government policies do not support. b). Farmers; Lack of transparency and credibility of the board, still considers aid as funds ran out, supervision is not maximized, access to financial institutions is difficult, the lack of funds and market information. Efforts to the development of economic institutions of society in North Konawe, namely; maximizing the role of government in capital/equipment and surveillance, training about the management, maximization supervision, the role of extension workers.*

**Keywords: Institute Strengthening Economics Community**

## Pendahuluan

Lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani dalam menegosiasikan hasil produksinya merupakan masalah yang dihadapi mayoritas petani di Indonesia, hal tersebut dilatar belakangi oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya keuangan (permodalan dan peralatan) maupun sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar hasil-hasil produksi petani akhirnya dijual kepada tengkulak yang ada di desa-desa.

Sesbany (2008) menemukan bahwa sebanyak 40 persen dari hasil penjualan panen diberikan kepada tengkulak. Hal ini dikarenakan petani kesulitan menjual hasil panennya yang diawali dari ketidakmampuan petani masuk ke jalur pemasaran. Hal yang sama diungkapkan oleh Branson dan Douglas (1983) bahwa lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.

Petani membutuhkan intervensi dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dll. Untuk menaikan posisi tawar (*bargaining position*) petani. Intervensi tersebut merupakan bentuk pemberdayaan petani sehingga mereka dapat memiliki sumber daya yang lebih banyak dan baik. Kartasasmita (1997) mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan alternative solusi terhadap persoalan pembangunan yang dihadapi saat ini. Dahuri (2001) mengemukakan bahwa pemberdayaan menjadikan individu sebagai aktor utama dalam menentukan arah kehidupan mereka bukan sebagai obyek.

Jamal (2008) mengatakan bahwa lembaga akan dapat berfungsi secara maksimal bila petani sendiri menjadi aktor utama dalam organisasi tersebut. Pembentukan organisasi yang kuat dapat memberikan posisi tawar petani untuk dapat berinteraksi dengan pelaku ekonomi yang lain, sehingga keuntungan dapat diraih.

Pembentukan suatu lembaga ekonomi didesa-desa merupakan suatu wadah yang dapat menjadikan tempat berhimpunnya dan menyalurkan aspirasi dalam rangka meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*). Tentu, pendirian lembaga ekonomi tersebut bukan didasarkan mobilisasi atau keinginan individu-individu tertentu

melainkan kesadaran yang sungguh-sungguh dari petani. Kesadaran yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam lembaga, karena tanpa partisipasi aktif dari petani yang merupakan anggota organisasi maka lembaga yang dibentuk akan sulit untuk mencapai tujuannya.

Elizabeth dan Darwis (2003) mengungkapkan bahwa lembaga ekonomi di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linear, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa : kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan dan pengembangan pengakuan. Pemenuhan kebutuhan sosial dapat berdampak pada kemampuan kerja seseorang, sehingga seorang petani dapat bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Masmulyadi (2007) menambahkan kesadaran akan timbul bila adanya kebutuhan yang sama antar anggota organisasi. Dibutuhkan *sense of belonging* yang tinggi terhadap lembaga sebagai kunci keberhasilan pemberdayaan. Hal ini sangat penting untuk ditekankan karena kegagalan fungsi kelembagaan di masa lalu lebih disebabkan oleh kuatnya dominasi pendekatan “*top down*” yang sudah terbukti sangat kondusif melahirkan mekanisme kelembagaan yang dipenuhi dengan masalah KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Lembaga ekonomi masyarakat di desa-desa diharapkan dapat menjadikan petani lebih kuat dan mandiri dalam melakukan produksinya, sehingga persoalan yang selama ini dihadapi, seperti: jaringan pemasaran yang terlalu panjang, distribusi, biaya operasional yang tinggi, kualitas produksi yang rendah, dan lain-lain dapat diminimalkan sehingga petani mendapatkan nilai tambah dengan maksimal.

Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat cukup menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Namun, sebagai organisasi yang baru terbentuk dan beranggotakan petani maka tidak lepas dari berbagai permasalahan sehingga dibutuhkan penguatan terhadap lembaga ekonomi tersebut. Penguatan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat mereduksi permasalahan yang timbul baik secara internal maupun eksternal.

Sesbany (2008) mengemukakan dalam pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan

harus memperhatikan prinsip agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, seperti: prinsip otonomi (spesifik lokal), prinsip pemberdayaan petani, prinsip kemandirian lokal. Selanjutnya Saptana, *et al.* (2004) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu : 1). Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri, 2. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Hal serupa diungkapkan oleh Uphoff (1992) bahwa dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan, seperti: pemerintah lokal, masyarakat (anggota organisasi), pihak swasta.

Prasetyo (2011) menyebutkan bahwa ada 4 kriteria agar organisasi petani kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu : 1). Asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, 2). Pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, 3). Memiliki kekuatan kelembagaan formal dan, 4). Bersifat partisipatif.

Penguatan kelembagaan tentunya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka memperkuat manajemen usaha dalam rangka membangun kerjasama atau *linkage* dengan berbagai pihak, sehingga kegiatan usaha dapat meningkat dan keberlanjutan usaha dapat berlangsung lama. Kabupaten Konawe Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang relative baru terbentuk (tahun 2007) mempunyai cukup banyak potensi sumber daya yang dapat dikembangkan oleh masyarakat baik dari sektor pertanian, perikanan, peternakan maupun sektor jasa sehingga keberadaan lembaga ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan. Tentu, lembaga ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti yang terjadi pada daerah-daerah lain.

## METODOLOGI

Desain penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Pemilihan desain tersebut karena ingin menemukan fakta dengan interpretasi yang

tepat dari fenomena yang terjadi pada obyek penelitian (Nazir, 2011)

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Utara dengan objek penelitian yaitu pada lembaga ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Lembaga ekonomi masyarakat yang dimaksud adalah Koperasi dan kelompok tani.

Mengingat luas wilayah di Kabupaten Konawe Utara, maka dilakukan sampel wilayah kecamatan (*Cluster Sampling*) yaitu; populasi dibagi dalam beberapa area kecamatan, kemudian area kecamatan dipilih menjadi sampel. Adapun kecamatan yang terpilih menjadi sampel yakni Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Oheo dan Kecamatan Asera. Pemilihan sampel area kecamatan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Selanjutnya pemilihan unit sampel (kelembagaan ekonomi masyarakat) pada setiap kecamatan yang dipilih menggunakan *judgement sampel*, yakni pemilihan unit sampel (kelembagaan ekonomi masyarakat) berdasarkan pertimbangan kemudahan dan kemauan dalam memberikan informasi.

Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi. Data diperoleh dengan mewawancarai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) dan anggota lembaga ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan interaktif (Miles dan Huberman, 2009) dengan melalui proses analisis data dari reduksi, penyajian dan verifikasi, penarikan kesimpulan.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengelompokkan sesuai dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan reduksi data hasil wawancara khususnya data-data yang berulang dan tidak terkait dengan topik pembahasan. Langkah berikutnya melakukan penyajian dengan menggunakan grafik, gambar, bagan dan tahap terakhir membuat kesimpulan data-data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara

Keberadaan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kelurahan akan mampu melepas ketergantungan petani dari tengkulak atau pemilik modal yang menguasai harga

sehingga petani dapat memutus siklus kemiskinan yang berkepanjangan.

Lembaga ekonomi masyarakat terdapat pada seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Utara, baik yang dibentuk dengan inisiatif masyarakat maupun yang dimotori oleh pemerintah daerah. Lembaga ekonomi masyarakat terdiri dari; koperasi dan kelompok tani.

Keberadaan koperasi dan kelompok tani diharapkan mampu menjadi instrument petani dalam peningkatan taraf hidup. Lembaga ekonomi diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh petani seperti; modal, peralatan/mesin, tehnik produksi, manajemen pengelolaan usaha.

Intervensi pemerintah terhadap lembaga ekonomi masyarakat mutlak dibutuhkan, tidak hanya pemberian bantuan modal, tetapi hal-hal lain seperti; peningkatan tingkat pemahaman masyarakat terhadap cara produksi yang lebih efektif dan efisien serta akses terhadap pasar dan bahan baku sangat dibutuhkan.

Akhmad (2007) mengungkapkan upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan : a). Konsolidasi petani dalam satu wadah kelembagaan untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran; b). Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif; dan c). Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian

**Karakteristik Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara**

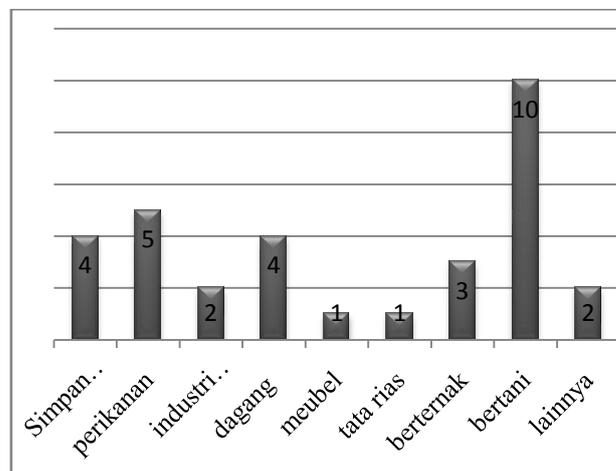
Berikut ini adalah karakteristik lembaga ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara, adalah sebagai berikut;

**a. Kegiatan usaha**

Simpan pinjam merupakan kegiatan atau unit usaha yang paling banyak dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini koperasi. Selain simpam pinjam, perdagangan (sembako) merupakan kegiatan usaha yang juga paling banyak dilakukan oleh koperasi. Disamping usaha-usaha tersebut koperasi juga

melakukan kegiatan seperti meubel dan tata rias (salon).

Grafik 1  
Kegiatan Usaha Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara

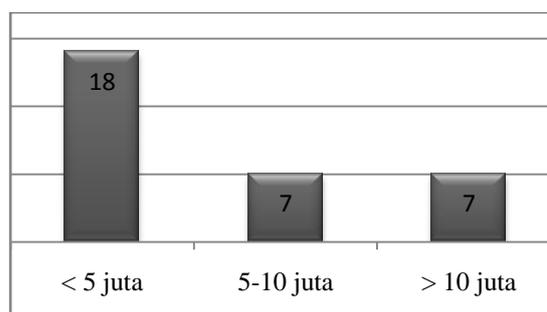


Sumber ; data diolah, 2015

**b. Modal Usaha**

Lembaga ekonomi yang ada memiliki modal usaha sangat terbatas, sebagian besar lembaga ekonomi masyarakat mempunyai modal sebesar Rp. 5 juta rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa bantuan modal usaha baik berupa uang maupun mesin/peralatan sangat dibutuhkan oleh lembaga ekonomi masyarakat.

Grafik 2  
Jumlah Modal Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara



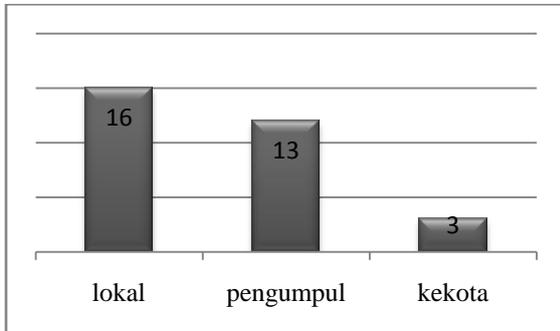
Sumber ; data diolah, 2015

**c. Tempat Pemasaran Hasil Produksi**

Ketersediaan pasar terhadap hasil produksi dari masyarakat sangatlah menentukan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat, tanpa pasar yang pasti

dan menguntungkan maka kelangsungan lembaga ekonomi tidak dapat berkembang.

Grafik 3  
Tempat Pemasaran Hasil Produksi Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara



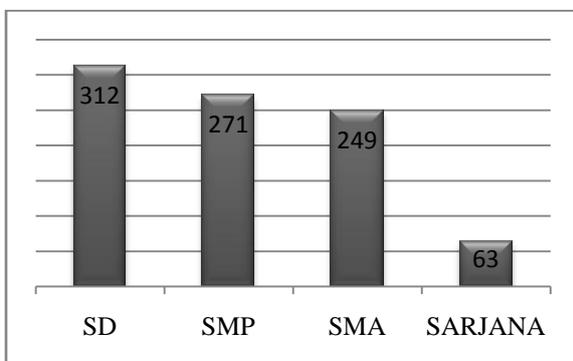
Sumber ; data diolah, 2015

**d. Tingkat Pendidikan Pengurus/Anggota**

Dimiyati ( 2007) mengungkapkan bahwa permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah; minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relative rendah.

Tingkat pendidikan pengurus atau anggota lembaga ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara sebagian besar lulus sekolah dasar (SD) sementara sarjana merupakan yang paling sedikit.

Grafik 4  
Tingkat Pendidikan Pengurus/Anggota Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara

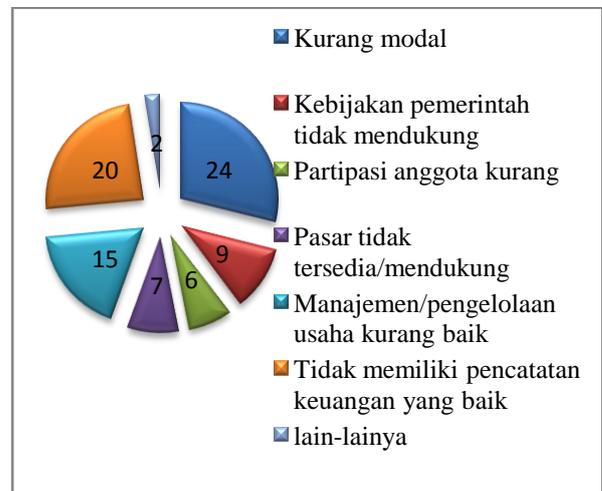


Sumber; data diolah, 2015

**e. Hambatan/Kendala Usaha**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara, adalah: kurangnya modal usaha, tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik dan faktor pengelolaan usaha yang kurang merupakan paling banyak ditemui. Hal lain adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta pasar yang belum tersedia.

Grafik. 5  
Hambatan Usaha/produksi Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara



Sumber ; data diolah, 2015

**Lembaga Ekonomi Koperasi di Kabupaten Konawe Utara**

Koperasi merupakan suatu usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi inilah yang menjadi nilai lebih atau keunggulan dibanding dengan model-model usaha lain yang ada. Disamping itu, koperasi sangat mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi modal, tetapi bukan berarti modal tidak penting bagi koperasi. Modal sangat penting dalam suatu usaha tidak terkecuali koperasi. Oleh karenanya pembentukan koperasi mensyaratkan kecukupan minimal anggota dan pembagian keuntungan atau dalam koperasi dikenal dengan sisa hasil usaha (SHU) mengedepankan partisipasi anggota.

Terbentuknya koperasi di sejumlah desa di Kabupaten Konawe Utara merupakan suatu

langkah yang positif dari masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Adanya koperasi tentu akan mengurangi dominasi orang-orang tertentu terhadap sumber daya ekonomi yang ada, baik itu harga, pasar maupun potensi lain yang ada di daerah tersebut.

Koperasi yang didirikan dengan kesadaran dari masyarakat atau petani tentu akan dapat berkembang dengan lebih baik dibandingkan dengan keterpaksaan atau mobilisasi dari kelompok atau orang tertentu. Fakta menunjukkan di Kabupaten Konawe Utara, ditemukan beberapa tipe/ciri koperasi.

Tabel 1  
Tipe/Ciri Koperasi di Kabupaten Konawe Utara

Kepemilikan/ Anggota	Kegiatan Usaha
a. Rumpun keluarga b. Petani/nelayan c. Kaum perempuan d. Umum (gabungan petani, pedangan dan PNS).	a. Simpan pinjam (SP). b. Perdagangan/pertokoan c. Tata rias (salon) d. Meubel e. Perikanan f. Pertanian

Sumber ; data diolah, 2015

## A. Dilihat dari Kepemilikan dan Pengelolaan

### 1. Tipe Koperasi Keluarga

Koperasi keluarga yang dimaksud adalah koperasi yang anggota atau kepemilikannya oleh suatu rumpun keluarga dan pengelolaannya pun dikelola oleh garis keturunan/rumpun keluarga. Beberapa koperasi keluarga yang ada mempunyai struktur pengurusnya, yakni; ketua, sekretaris dan bendahara berasal dari satu rumpun keluarga, begitu pula pengawasnya juga dari satu rumpun keluarga yang sama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi ini terbentuk karena adanya kesadaran atau tujuan tertentu dari beberapa orang atau individu dalam satu rumpun keluarga. Kemudian beberapa orang tersebut mengajak anggota keluarga yang lain untuk membentuk koperasi tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tipe koperasi

seperti ini banyak yang mengalami kegagalan, walaupun demikian koperasi seperti ini juga ada yang sukses atau aktif. Koperasi yang dikelola oleh rumpun keluarga juga mempunyai banyak unit usaha, seperti simpan pinjam, perdagangan, pertanian, dll.

### 2. Tipe Koperasi Wanita

Tipe koperasi ini dikelola atau anggotanya adalah wanita. Seluruh anggotanya adalah dari kaum wanita dalam hal ini ibu rumah tangga. Adanya kesadaran dan keinginan ibu rumah untuk mendirikan koperasi wanita tersebut menunjukkan bahwa ibu rumah telah mempunyai pemikiran untuk maju dan peningkatan kesejahteraan melalui suatu lembaga. Hal ini selayaknya mendapat apresiasi yang sangat besar terhadap tumbuhnya koperasi wanita dari berbagai pihak. Hal lain yang penting adalah ibu rumah merupakan pengatur keuangan dalam suatu rumah tangga sehingga dapat dikatakan bahwa ibu rumah tangga merupakan yang paling mengetahui dan memahami keadaan keuangan dalam keluarga.

Potensi pengembangan *home industri* akan sangat baik, hal dimungkinkan karena banyak ibu rumah tangga yang terampil dalam memproduksi barang, seperti; anyaman-anyaman, menjahit, memasak, tata rias, dan jasa lainnya dan selama ini hanya dilakukan secara perorang atau individu hanya menjadi pekerjaan sampingan sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Olehnya itu bila potensi ini dapat diberdayakan melalui lembaga ekonomi masyarakat, seperti koperasi maka tentu akan menjadi cikal bakal pengembangan ekonomi desa yang kuat. Dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

### 3. Model Koperasi Umum

Tipe koperasi yang berikut adalah koperasi yang dikelola oleh umum atau gabungan dari berbagai latar belakang anggotanya. Koperasi tipe ini merupakan koperasi yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini dikarenakan pendirian koperasi bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, olehnya itu bagi siapa saja yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama maka dapat mendirikan koperasi. Hal ini juga dapat dilihat pada prinsip-prinsip koperasi, bahwa keanggotaan koperasi adalah terbuka bagi siapa pun sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan

dan menyetujui aturan main dalam koperasi tersebut dapat menjadi anggota koperasi.

Pembentukan koperasi dengan model ini sangatlah positif untuk pengembangan ekonomi desa, hal ini disebabkan Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah yang multi kultur dan multi etnis (bugis, tolaki, jawa, bali, muna, dll) serta dari berbagai latar belakang pekerjaan (petani, pedagang, nelayan, PNS, Polisi, dll) sehingga dengan berkembangnya koperasi model ini maka seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

## **B. Dilihat dari Jenis Usaha**

### **1. Koperasi Simpan Pinjam (SP)**

Koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan koperasi yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Konawe Utara saat ini. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan kredit/modal usaha atau untuk konsumsi masyarakat sangat tinggi.

Tumbuhnya koperasi simpan pinjam (KSP) atau koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam dikarenakan masih kurangnya lembaga-lembaga keuangan atau non keuangan yang menyediakan kredit kepada masyarakat. Tercatat bahwa bank di Kabupaten Konawe Utara saat ini baru terdapat dua bank. Di sisi lain berkembangnya koperasi ini, menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara sedang tumbuh. Dimana dengan adanya dana yang dimiliki masyarakat maka petani dapat melakukan aktifitas ekonomi seperti untuk investasi atau minimal konsumsi, sehingga gairah aktifitas ekonomi dapat tumbuh. Tentu dengan aktifitas ekonomi yang jalan maka masyarakat akan mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi desa dapat berjalan dan tumbuh.

Walaupun demikian, pertumbuhan koperasi simpan pinjam yang cukup baik, bukan berarti koperasi ini tidak mempunyai faktor-faktor yang perlu diperbaiki. Bunga yang tinggi yang dibebankan pada calon anggota atau anggota masih tergolong sangat tinggi daripada bunga pasar.

Bunga yang berlaku yakni berkisar antara 7,5% - 15% perbulan. Artinya bila dikalikan dalam pertahun dapat mencapai 90%-180%. Hal ini cukup membebani masyarakat dalam berusaha. Sehingga usaha yang dilakukan masyarakat perkembangannya sangat lambat bahkan rentan pada

kebangkrutan dan menimbulkan kredit macet. Akhirnya masyarakat atau petani terlilit pada utang yang banyak dan berkepanjangan. Dan sangat mungkin asset petani atau masyarakat, seperti; tanah, mesih, kebun akan dijual oleh petani untuk melunasi utangnya atau asset petani tersebut disita oleh pihak koperasi.

### **2. Koperasi Unit Usaha Perdagangan/Pertokoan**

Koperasi yang mempunyai unit usaha perdagangan/pertokoan (sembako) juga banyak ditemukan di Kabupaten Konawe Utara, hal ini juga disebabkan usaha ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Karena jarak yang begitu jauh dengan perkotaan, disamping itu keberadaan warung/kios sembako di desa relative masih sedikit. Dimana hanya desa-desa tertentu terdapatnya warung atau kios sembako. Hal lain yang menjadi faktor pendukung dapat berkembangnya usaha ini adalah keberadaan pasar rakyat di desa-desa juga masih sangat kurang. Bahkan sebagian wilayah atau desa yang ada di Kabupaten Konawe Utara tidak mempunyai pasar desa dan harus kedesa terdekat. Disamping itu juga pasar desa tersebut hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam seminggu.

Dengan pasar desa yang masih kurang dan dilaksanakan sekali atau dua kali dalam seminggu maka jelas kebutuhan sembako masyarakat di desa-desa di Kabupaten Konawe Utara tidak akan terpenuhi dengan baik, sehingga kehadiran warung/kios sembako di desa sangatlah dibutuhkan.

### **3. Koperasi Unit Usaha Tata Rias (Salon)**

Koperasi unit usaha tata rias (salon) juga potensial untuk dikembangkan. Koperasi yang mempunyai usaha ini dapat berkembang karena kebutuhan akan tata rias (salon) masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kebutuhan tata rias, seperti; jasa layanan tata rias untuk pernikahan, perawatan kecantikan pria maupun wanita.

Usaha jasa ini tentu akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan Kabupaten Konawe Utara. Perkembangan kabupaten diperkirakan tahun-tahun mendatang akan cepat hal ini disebabkan Kabupaten Konawe Utara merupakan kabupaten yang terdapat puluhan perusahaan tambang dan perkebunan. Dengan adanya

perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan tentu akan membawa dampak terhadap kebutuhan jasa tenaga .

Disamping itu koperasi ini sangat potensial untuk dikembangkan karena usaha ada padat karya bukan padat modal, dimana masyarakat dapat menjalankan usaha walaupun hanya mempunyai modal terbatas. Hal lain yang mendukung adalah banyak wanita atau ibu rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara telah mempunyai pengetahuan dasar tentang tata rias, sehingga memudahkan dalam menjalankan usaha ini.

#### **4. Koperasi Unit Usaha Meubel**

Kebutuhan perabot rumah tangga (meubel) di Kabupaten Konawe Utara cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha-usaha meubel dikelola secara perorangan/individu yang ada di kabupaten ini. Hampir setiap desa terdapat usaha-usaha meubel, walaupun hanya dalam skala kecil.

Usaha meubel tersebut ada yang dikelola oleh individu atau perorangan juga sudah terdapat koperasi yang mempunyai unit usaha meubel. Hal ini cukup positif karena usaha ini cukup potensial untuk dikembangkan di kabupaten ini. Seperti kebutuhan terhadap perabot rumah tangga/meubel (lemari, kursi, meja, tempat tidur, pintu-pintu/jendela) pada daerah yang sedang berkembang sangat tinggi. Hal lain yang mendukung dapat berkembangnya usaha meubel ini di Kabupaten Konawe Utara adalah daerah ini merupakan mempunyai hutan yang sangat luas. Sehingga ketersediaan bahan baku (kayu) tidak menjadi hambatan. Hal ini juga merupakan nilai tambah atau keunggulan dari meubel di kabupaten ini karena biaya produksi relative lebih murah dari diibukota propinsi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah banyak masyarakat di Kabupaten Konawe Utara mengetahui cara pembuatan perabot rumah tangga tersebut dan bahkan tidak sedikit masyarakat terampil. Ini merupakan salah satu faktor pendukung yang cukup baik.

#### **5. Koperasi Unit Usaha Perikanan**

Perikanan merupakan salah satu potensi Kabupaten Konawe Utara, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Utara lebih banyak berada atau mempunyai pesisir laut, dapat dilihat beberapa kecamatan terdapat di sepanjang pesisir laut, seperti;

Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo dan Langgikima.

Keberadaan wilayah pesisir yang cukup panjang, menunjukkan bahwa potensi pengembangan perikanan cukup terbuka. Disamping itu beberapa wilayah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara juga memiliki potensi perikanan darat (air tawar), seperti yang terdapat di Kecamatan Oheo (Desa Linomoiyo, Sambadete, Bendewuta, Laroonaha), Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Wiwirano.

Oleh karena itu, pengembangan perikanan di Kabupaten Konawe Utara dapat dikatakan mempunyai potensi perikanan di seluruh kecamatan yang ada, yakni 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana terdapat potensi perikanan laut dan perikanan darat (air tawar). Sehingga bila hal ini (koperasi perikanan) dapat terbentuk maka potensi untuk berkembang sangatlah besar, disamping ketersediaan bahan baku (ikan) baik laut maupun darat (air tawar) juga karena sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian/pekerjaan sebagai nelayan.

Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Konawe Utara dapat menjadi keunggulan daerah bahkan dapat menjadi ikon daerah sebagai sektor unggulan untuk dikembangkan, pengelolaan terhadap hasil perikanan selama masih dilakukan secara perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai modal, sehingga daya tawar nelayan masih sangat lemah.

Keberadaan koperasi perikanan atau koperasi yang mempunyai unit usaha perikanan masih kurang sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak sehingga kedepan koperasi yang bergerak pada usaha perikanan dapat lebih banyak dan berkembang serta mencapai tujuannya yakni kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### **6. Koperasi Unit Usaha Pertanian**

Pertanian merupakan salah satu potensi yang sangat besar di Kabupaten Konawe Utara, hal dapat dilihat bahwa seluruh kecamatan atau wilayah yang ada di kabupaten ini memiliki lahan pertanian, mulai dari tanaman jangka panjang, seperti ( kelapa, merica, cengkeh, sagu, coklat, jambu, jati dan kopi) juga terdapat tanaman jangka pendek (padi, kacang kedele, kacang ijo, jagung, dll).

Lahan pertanian yang sudah diolah relatif cukup luas akan tetapi lahan yang belum diolah juga masih cukup luas, hal ini menunjukkan bahwa potensi pertanian yang di Kabupaten Konawe Utara sangat besar. Sehingga potensi untuk pengembangan terhadap usaha ini sangatlah besar.

Pengolahan lahan pertanian masih banyak yang dilakukan secara perorangan/individu atau sendiri-sendiri. Seperti dalam persawahan, dimana sawah tersebut dikelola secara sendiri dan hasilnya pun dipasarkan secara sendiri pula, sehingga petani tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) terhadap harga dipasar, contoh lain adalah petani cengkeh atau kelapa dimana hasil panen petani juga dijual pada pengumpul didesa atau kecamatan sehingga harga hanya ditentukan oleh satu pihak (pengumpul).

Keberadaan koperasi yang bergerak atau mempunyai unit usaha dibidang pertanian adalah sesuatu yang positif dan potensial untuk dikembangkan. Disamping lahan yang cukup tersedia juga masyarakat Konawe Utara mayoritas adalah petani. Sehingga koperasi yang bergerak di bidang pertanian harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang pada akhirnya koperasi yang mempunyai unit usaha pertanian/bertani masih sangat kurang dapat lebih banyak dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat/petani.

### C. Hambatan dan Upaya Pengembangan dan Upaya Penguatan Kelembagaan Koperasi

Tabel 2

Faktor Penghambat dan Upaya Penguatan Kelembagaan Koperasi di Kabupaten Konawe Utara

Faktor Penghambat	Upaya Penguatan
Banyak anggota koperasi tidak paham dan mengerti tujuan pembentukan koperasi.	Pelatihan dan Penyuluhan terhadap masyarakat (anggota koperasi/calon anggota koperasi)
Anggota koperasi hanya menjadi persyaratan terbentuknya koperasi.	
Pengurus tidak mengetahui prinsip-prinsip koperasi dalam menjalankan koperasi.	
Pengurus kurang memahami pengelolaan	

usaha yang baik.	
Pembentukan koperasi hanya untuk sebagai alat menerima/menunggu bantuan.	
Tidak adanya pengawasan yang baik terhadap koperasi.	Pengawasan dan pembinaan
Kebijakan pemerintah daerah yang belum mendukung	Pemerintah daerah harus lebih proaktif

#### 4.1.1 Lembaga Ekonomi Kelompok Tani

Selain koperasi juga terdapat kelompok tani yang merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Tumbuhnya lembaga-lembaga ekonomi di desa akan sangat tergantung dari dukungan kebijakan pemerintah daerah terutama pada daerah yang baru terbentuk, seperti Kabupaten Konawe Utara ini.

Dukungan terhadap tumbuhnya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat di desa dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara cukup baik, hal ini dapat dilihat bantuan-bantuan modal dan peralatan (mesin-mesin) terhadap lembaga-lembaga ekonomi masyarakat cukup banyak. Saat ini sebagian besar desa di Kabupaten Konawe Utara telah memiliki kelompok-kelompok tani.

Kelompok tani yang ada cukup banyak dan juga mempunyai aneka atau bermacam-macam kegiatan usaha. Penentuan kegiatan usaha tentu dilakukan oleh masyarakat/petani dengan melihat potensi desa dan kemampuan masyarakat.

#### 1. Pertanian

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan kelompok tani dalam bidang pertanian, yaitu; persawahan, perkebunan coklat, kelapa, durian, dll. Luasnya lahan pertanian yang di kabupaten ini, baik itu lahan yang sudah terolah maupun yang belum (lahan tidur) maka langkah ini sangat tepat dalam pemberdayaan ekonomi desa. Beberapa areal persawahan yang terolah terdapat di beberapa kecamatan seperti; Kecamatan Oheo, Asera dan Andowia.

Perkebunan coklat terdapat di Kecamatan Asera dan pembukaan lahan untuk penanaman durian juga terdapat di Kecamatan Oheo. Sedangkan, perkebunan kelapa dan palawija terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Walaupun sudah

terdapat kelompok-kelompok tani disejumlah desa di kabupaten ini tetapi pelaksanaan program-program kelompok tani dari pemerintah masih belum maksimal.

## 2. **Peternakan**

Beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Konawe Utara memiliki kegiatan peternakan, seperti; peternakan sapi, kambing dan ayam kampung. Walaupun dengan berbagai persoalan atau kendala terhadap pelaksanaan program untuk kelompok tani ternak ini, namun masih dapat berjalan. Ternak sapi merupakan program yang banyak di pilih oleh kelompok petani, hal ini disebabkan sapi mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik dan tinggi.

## 3. **Pemasaran hasil**

Kelompok tani yang mempunyai usaha jual beli hasil pertanian adalah petani yang berlatar belakang sebagai pedangan kecil/pedangan sembako.

Hasil wawancara dengan para pedangan hasil pertanian/sembako bahwa dengan adanya program kelompok tani untuk jual beli hasil-hasil pertanian pendatan mereka atau usaha mereka cukup meningkat, dimana dengan tingkat bunga pengembalian yang berkisar antara 1,5 persen - 2 persen perbulan sangatlah meringankan petani dalam mendapatkan bantuan modal usaha.

Beberapa pedangan yang di wawancara menghendaki program bantuan modal usaha terhadap pemasaran hasil-hasil pertanian dapat lebih ditingkatkan dalam hal jumlah modal yang diberikan kepada petani atau pedangang, sehingga memungkinkan untuk pengembangan yang lebih baik.

## 4. **Industri kecil**

Kelompok tani yang mempunyai usaha produksi, seperti; pengolahan sagu dan pengolahan minyak kelapa. Hal ini cukup potensial untuk dikembangkan dikarenakan bahan baku yang dibutuhkan relative tersedia. Kegiatan usaha tersebut terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Konawe Utara memiliki perkebunan kelapa yang sangat luas, hal ini dilihat di Kecamatan, Lembo, Sawa, Lasolo dan Andowia.

Kelompok tani yang mempunyai usaha pengolahan minyak kelapa telah memberikan nilai tambah terhadap petani kelapa. Walaupun sudah banyak produk minyak yang ada

dipasaran akan tetapi kebutuhan terhadap minyak kelapa buatan/produksi lokal masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan minyak kelapa produksi lokal atau diproduksi secara manual memiliki citra rasa terendiri.

Kelompok tani pengolahan sagu, juga sangat potensial dikarenakan ketersediaan sagu relative tersedia. Hal terpenting adalah sagu ini merupakan salah satu makanan pokok masyarakat di kabupaten ini sehingga kebutuhan terhadap sagu sangat tinggi, sehingga keberadaan kelompok tani ini haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak.

## 5. **Perikanan**

Kelompok tani perikanan banyak terdapat di Kecamatan Motui, terdapat kelompok tani yang cukup berhasil. Hasil produksinya, yakni berupa kepiting, ikan dan udang. Disamping itu potensi perikanan juga terdapat di beberapa kecamatan lain yang ada di kabupaten ini, misalnya Kecamatan Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe, Langgikima. Disamping perikanan laut juga terdapat potensi perikanan darat (air tawar). Potensi terdapat di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Oheo, Wiwirano, Asera dan Andowia. Olehnya itu sektor perikanan sangat baik untuk di kembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Kondisi saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan cara/penangkapan ikan secara tradisional sehingga hasilnya tidak maksimal, disamping itu budidaya juga belum dilakukan sehingga masyarakat dalam menangkap ikan masih sangat tergantung pada musim atau cuaca.

## 6. **Hambatan-hambatan dan Upaya Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelompok Tani di Kabupaten Konawe Utara.**

Tabel 3  
Faktor Penghambat dan Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani di Kabupaten Konawe Utara

Faktor Penghambat	Upaya Penguatan
Pengurus kelompok tani (ketua, sekretaris, bendahara) tidak transparan dalam pengelolaan	Pelatihan tentang pengelolaan atau manajemen usaha

dana/bantuan dari pemerintah daerah.	harus dilakukan, baik sebelum ada bantuan usaha maupun ketika bantuan sudah digulirkan.
Pengurus kurang mempunyai kredibilitas pada anggotanya.	
Masyarakat kurang memahami manajemen pengelolaan usaha yang baik.	
Masih banyak masyarakat yang beranggapan bantuan dari pemerintah daerah merupakan dana habis yang harus dibagi.	
Akses pada lembaga-lembaga perbankan sangat sulit.	Pengawasan dan pembinaan
Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan kurang efektif.	
Kurangnya dana/modal usaha.	Pemberian bantuan modal usaha yang proporsional dan tepat sasaran
Informasi pasar terhadap petani/masyarakat sangat terbatas.	Ketersediaan pasar

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa;

1. Kelembagaan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara relative belum memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani.
2. Lembaga ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari kelompok tani dan koperasi.
3. Beberapa kendala atau hambatan yang menjadi penyebab kurang maksimalnya peran lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (baik koperasi maupun kelompok tani) di Kabupaten Konawe Utara adalah:
  - a) Koperasi; Anggota tidak paham dengan tujuan pendirian koperasi, anggota hanya sebagai kecukupan persyaratan pendirian koperasi, pengurus belum memahami prinsip koperasi dan pengelolaan usaha yang baik, belum ada pengawasan yang maksimal dari pihak terkait, kebijakan pemerintah daerah yang belum mendukung keberadaan koperasi.
  - b) Kelompok Tani; Pengurus tidak transparan dalam mengelolah organisasi, Pengurus kurang mempunyai kredibilitas,

masyarakat masih beranggapan bantuan sebagai dana habis, kurangnya dana usaha, pengawasan yang belum maksimal, akses kepada lembaga-lembaga keuangan sangat sulit, ketersediaan informasi pasar yang kurang.

### Rekomendasi/saran

Berdasarkan hasil analisis, maka saran atau rekomendasi tim peneliti adalah;

1. Peran pemerintah daerah (dinas terkait) harus lebih dimaksimalkan terhadap lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (koperasi dan kelompok tani) baik dalam hal kebijakan, bantuan modal/peralatan usaha maupun pengawasan.
2. Penyuluhan atau pelatihan terhadap anggota/pengurus lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (koperasi dan kelompok tani) harus dapat dilakukan secara sistematis dan berkala, baik tentang pengelolaan/manajemen usaha maupun motivasi dalam berusaha.
3. Pengawasan terhadap bantuan yang diberikan kepada lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (koperasi dan kelompok tani) harus lebih maksimal.
4. Peranan penyuluh terhadap koperasi dan kelompok tani harus dapat dimaksimalkan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad, S., 2007. Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian Berkelanjutan; Perlawanan Terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian. Tegalan Diterbitkan oleh BABAD. Purwokerto. Jawa Tengah.
- Branson, R E. dan Douglas G.N., 1983. Introduction to Agricultural Marketing, McGraw-Hill Book Company, New York, USA
- Dimiyati, A., 2007. Pembinaan Petani dan Kelembagaan Petani. Balitjeruk Online. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung-Batu. Jawa Timur
- Elizabeth, R dan Darwis, V., 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur. SOCA. Bali.
- Jamal, H, 2008. Mengubah Orientasi Penyuluhan Pertanian. Balitbangda Provinsi Jambi. Jambi Ekspres Online. Diakses tanggal 18 Februari 2014.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah bahan matakuliah pada Program Pascasarjana-Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Masmulyadi. 2007. Membangun Kesadaran dan Keberdayaan Petani. Diakses dari Internet tanggal 1 Juni 2014.
- Milles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Edisi Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Prasetyo, Aris Budi. 2011, Penguatan Kelembagaan Petani Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani. Arisbudiprasetyo.wordpress.com (akses 1 Juni 2014)
- Rokhmin Dahuri. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Saptana, T; Pranadji; Syahyuti dan Roosganda, E.M., 2003. Transformasi Kelembagaan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian. PSE. Bogor.
- Sesbani.2008. Penguatan Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani,Jurnal.
- Uphoff, N., 1992. Local Institution and Participation for Sustainable Development. IIED. Londo



